

H

PENGESAHAN

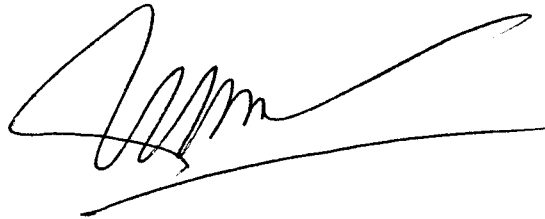
**Efisiensi dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Pajak
Daerah di Kabupaten Gunungkidul
1990-2004**

Nama : Ardian Damar Sasono
Nomor Mahasiswa : 02313049
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 14 November 2006

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Jaka Sriyana, Dr., Drs., M.Si

3. Seluruh Staf Akademik, Staf Tata Usaha, dan Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Karyawan-karyawati BPS Yogyakarta dan Gunungkidul terimakasih atas bantuan dan datanya.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Sobat-sobatku Green Kost sebagai awal aku berjuang di Jogja: Dwi Emon, Erwin Ucup, Seno to drug, Herry Bengkulu, Aphe “ Rakha”, Ipank Mansyur , Acca Aconk, Danang dan Charles
7. Adinda Deliana Eka Kusumawati yang telah memberi support dan doa selalu. Terima kasih atas kenangannya, jangan lupaiin mas ya....
8. Teman-teman KKN UNIT 110: Lela, Wiwin, Ika, Linda, Yanti, Dodo. Terima kasih atas kenangan terindah di Alam Nguntuk-untuk.
9. Cah2 EP: Nopha n Budi Cla-X, Sis Mogol, Gugun G, Indra Lupus “vespa ijo”, Cholid, den mas wahyu slemania, Ira_one, Pajar “jarwo”, Pitra, Hendi, Arman, Fika, Rini, Ina, Sari 03, Ipoey ”captain jack”, Hatta, Beny, Eko, Yuli, Mamad, gembong, Yadin, Andy “komeng’, Fahmi serta seluruh rekan2 seperjuangan dalam panji2 EP 02, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu..Kalian adalah teman2 terbaikku, bersama kalian aku telah menemukan arti sebuah persahabatan dan kekompakan. Sukses slalu and bravo SEPAKBOLA EP..

TABEL 2.12.

**Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 1990-2004**

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (ribu Rp)	% terhadap PAD	Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (ribu Rp)	% terhadap PAD
1990	59.746,00	5.11	1998	807.150,00	18.04
1991	57.681,00	4.16	1999	982.690,00	18.17
1992	69.552,00	4.20	2000	901.597,00	15.76
1993	87.619,00	4.64	2001	1.330.254,00	15.02
1994	103.276,00	4.83	2002	1.892.344,00	14.03
1995	371.694,00	14.17	2003	3.023.328,00	17.29
1996	557.462,00	18.85	2004	2.776.746,00	14.08
1997	635.773,00	17.77			

*Sumber: Gunungkidul dalam angka, BPS Kabupaten Gunungkidul
(berbagai terbitan/data diolah)*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat besarnya penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan dari tahun 1990-2004 besarnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Persentase terbesar dicapai pada tahun 1996 yaitu 18,85% dan terkecil sebesar 4,16% pada tahun 1991. pada saat terjadi puncak krisis ekonomi di Indonesia persentase penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul terhadap PAD masih berkisar diatas 17% yaitu 17,77% namun sejak tahun 2000 turun menjadi 15,76%, hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan perhitungan tahun, yaitu tahun fiskal menjadi tahun kalender. Tahun 2001 dimana awal diberlakukannya otonomi daerah, penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul turun menjadi 15,02% serta 14,03% di tahun 2002. kemudian meningkat lagi menjadi 17,29% pada tahun 2003. tetapi peningkatan ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2004 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan menjadi 14,08%.

Indonesia, selain disebabkan oleh adanya kebijakan reformasi perpajakan juga ditentukan oleh peningkatan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk, khususnya penduduk yang bekerja. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dengan reformasi perpajakan yang ditandai dengan lahirnya UU Perpajakan yang tercakup dalam UU No 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan dampak penghapusan komponen pendapatan daerah, namun juga memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menetapkan penerimaan daerah (peningkatan kemandirian pembiayaan bagi pemerintah daerah). Dampak lain dari adanya reformasi perpajakan adalah peningkatan efisiensi ekonomi nasional sehingga akan merangsang investor untuk menanamkan modal usahanya di masing-masing daerah. Dalam jangka panjang peningkatan investasi akan berdampak pada peningkatan volume kegiatan ekonomi, sehingga secara otomatis akan meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.

4) Faktor Ekonomi (*Economic of Collection*)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

4.3.3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai 2 fungsi utama yaitu: sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regularend*).

4.3.3.1. Sumber keuangan negara (*Budgetair*)

Fungsi sumber keuangan negara yaitu bahwa fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

4.3.3.2. Fungsi mengatur atau *non budgetair* (*regularend*)

Yaitu kewenangan dan usaha pemerintah untuk ikut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Dalam fungsi mengatur ini, pemungutan pajak digunakan untuk:

- a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial
- b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. (Tjahjono, 1997: 4-6)

4.8. Hipotesis

Hipotesis tidak lain dari jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang dicari atau yang ingin dipelajari

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, serta tujuan dari penelitian, maka dituliskan beberapa hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Efisiensi pengelolaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah
- b) Efektivitas pengelolaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
- c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul.
- d) Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul.
- e) Jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul.
- f) Penerimaan pajak daerah di tahun-tahun mendatang akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

distribusi t maupun F tidak bisa lagi dipercaya untuk evaluasi hasil regresi (ii). (Widarjono, 2005 : 147)

Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara uji *white*, yaitu tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada residual. Untuk menjelaskan metode *white*, ditulis model sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + e_i$$

Jika nilai chi-square hitung (χ^2) lebih besar dari nilai χ^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika chi-square hitung lebih kecil dari nilai χ^2 kritis maka menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

Selanjutnya dengan membandingkan antara χ^2_{hitung} dan χ^2_{tabel} akan diketahui adanya heteroskedastisitas atau tidak:

$$\chi^2_{\text{tabel}} > \chi^2_{\text{hitung}} \rightarrow \text{tidak ada heteroskedastisitas.}$$

$$\chi^2_{\text{tabel}} < \chi^2_{\text{hitung}} \rightarrow \text{terdapat heteroskedastisitas.}$$

Perhitungan trend diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah selama tahun 2006 sampai dengan 2008 diperkirakan akan selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karenanya pemerintah daerah hendaknya dapat lebih memaksimalkan potensi-potensi yang ada khususnya dalam hal penerimaan dari sektor pajak daerah. Metode *Trend Least Square* ini dapat dijadikan metode alternatif yang dapat dipakai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk menentukan target penerimaan pajak daerah. Penggunaan metode trend ini hanya salah satu dari sekian banyak metode yang dapat digunakan untuk mengetahui/memprediksi penerimaan pajak daerah di tahun-tahun yang akan datang (tabel 6.8.).

Berdasarkan persamaan trend diatas maka dapat diperoleh prediksi penerimaan pajak daerah sebagai berikut:

TABEL 6.9.

**Prediksi penerimaan pajak daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2006-2008**

Nomor	Tahun Anggaran	Prediksi penerimaan pajak daerah (Rp)
1.	2006	3.397.031.911
2.	2007	3.764.005.982
3.	2008	4.130.980.053

Sumber: data diolah/lampiran XI

hendaknya dapat memacu dan mendorong pemerintah daerah untuk dapat mempertahankan keadaan yang sudah ada serta dapat lebih meningkatkan mekanisme dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dari sektor penerimaan pajak daerah.

2. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa variabel PDRB, jumlah wisatawan serta jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Tetapi dalam hal ini variabel jumlah wisatawan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Oleh karenanya pemerintah daerah dituntut untuk lebih dapat memaksimalkan potensi yang ada khususnya dari sektor pariwisata sehingga diharapkan akan lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, pemerintah daerah berperan penting dalam menentukan arah dan kebijakan daerah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.
3. Dengan adanya suatu perkiraan/prediksi mengenai penerimaan keuangan daerah khususnya pajak daerah, diharapkan pemerintah daerah mempunyai pedoman serta acuan untuk dapat merealisasikannya. Tetapi hendaknya hal ini diikuti kebijakan pemerintah yang sesuai serta birokrasi yang sehat dan transparan. Disamping itu juga diperlukan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- *Kedua Orang Tuaku tercinta:
Bapak M. Joko Sasono
dan Ibu Sudjarwanti*
- *Adikku: Giri Aji Nur Sasono*
- *Sahabat-sahabatku*

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian maupun penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Karena keterbatasan yang ada, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Desember 2006

Penulis,

Ardian Damar Sasono